

ABSTRAK

Pemerintahan Kabupaten Bungo khususnya dalam menjawab janji politik Bupati terpilih membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM), yaitu memberikan bantuan keuangan kepada dusun sejumlah Rp 250.000.000 per dusun. Pelaksanaannya harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun ada kondisi berbeda yang terjadi didalam pengelolaan dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo ini. Tiga Dusun di Kabupaten Bungo, Kecamatan Bathin III Ulu, tidak bisa lagi mencairkan dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) tahap II karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk pengerjaan pembangunan fisik. Tiga Dusun itu adalah Dusun Lubuk Beringin, Dusun Senamat Ulu dan Dusun Timbolasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Politik Dalam Anggaran Publik (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo ini, menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang berkaitan dengan akuntabilitas politik ini dan stakeholder yang dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang Akuntabilitas Politik dalam Anggaran Publik Dana GDM di Kabupaten Bungo, bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah Akuntabel karena Bupati terpilih telah merealisasikan janji politiknya dengan prinsip, dan komitmennya yang telah tertuang pada Perbub Nomor 5 Tahun 2017. Perbandingan antara Dusun Lubuk Beringin dan Tombolasi telah sama-sama akuntabel dalam penggunaan dana GDM, karena telah melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dengan partisipatif, serta realisasi anggaran yang terdokumentasikan pada RAB dengan baik dan terperinci, begitu juga dengan bangunan fisik yang tampak, kemudian dokumen laporan pertanggungjawaban seluruhnya telah dilaksanakan beserta melakukan transparansi berupa papan informasi pelaksanaan didalam area pembangunan, Namun hal yang berbeda terdapat di Dusun Sinamat Ulu Pemerintahan ini sama sekali tidak akuntabel, karena realisasi anggaran yang fiktif.

Kabupaten sebaiknya dapat memberikan sistem yang lebih ringkas dan mudah untuk diaplikasikan oleh Pemerintah Dusun namun dapat di pertanggungjawabkan, karena tidak semua dusun mendapat akses yang mudah untuk menjalankan sistem yang ada sekarang, karena sebagian dusun memiliki jarak tempuh yang jauh, SDM yang tidak memadai, akses informasi sulit. Sebaiknya pemerintah dusun dalam penggunaan dana GDM dapat mengarahkan penggunaannya pada pembangunan yang produktif dalam segi ekonomi masyarakat contohnya adalah pembangunan jalan keperkebunan karet atau sawit masyarakat dan membangun pariwisata dusun dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di dusun.

Kata Kunci : Akuntabilitas politik. GDM, Pemerintah Dusun

ABSTRACT

The Bungo District Government in particular in responding to the political promises of the elected Regent made a policy through Bungo Regent Regulation Number 5 of 2017 concerning General Guidelines and Technical Guidelines for the Building Hamlet Movement Program (GDM), namely providing financial assistance to hamlets in the amount of Rp 250,000,000 for one hamlet from 141 hamlet. The implementation must be managed based on transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly and budgetary discipline. But there are different conditions that have occurred in the management of the fund of the Building Hamlet Movement (GDM) in Bungo District. Three hamlets in Bungo District, Bathin III Ulu District, could no longer withdraw funds from the Phase II Building Hamlet Movement (GDM) because they did not have enough time to undertake physical development. The three hamlets are Lubuk Beringin Hamlet, Senamat Ulu Hamlet and Timbolasi Hamlet.

Based on the background above, research is needed. In conducting research on Political Accountability in Public Budgets (Case Study: Management of Membangun Hamlet Funds (GDM) in Bungo District, using Qualitative Descriptive Research Methods. The reason for this study using a qualitative approach is because in this study the data generated are descriptive data obtained from data in the form of writing, words and documents originating from sources or informants related to this political accountability and trustworthy stakeholders.

Based on the analysis of the research on Political Accountability in the Public Budget of GDM Funds in Bungo Regency, that the Bungo District Government has been accountable because the elected Regent has realized his political promises with principles, and his commitments have been stated in the Regulation No. 5 of 2017. Comparison between Lubuk Beringin Hamlets and Tombolasi has been equally accountable in the use of GDM funds, because it has carried out the participatory planning documents, and the budget realization documented in the RAB is well and detailed, as well as the visible physical buildings, then the entire accountability report document has been carried out along with transparency in the form of an implementation information board in the development area, but different things are found in the Sinamat Ulu Hamlet. This government is totally unaccountable, because the realization of the budget is fictitious.

Districts should be able to provide a system that is more concise and easier to be applied by the Hamlet Government but can be accounted for, because not all hamlets have easy access to run the current system, because some hamlets have long distances, inadequate human resources, access difficult information. It is better if the hamlet government in using GDM funds can direct its use to productive development in terms of the economic community, for example the construction of community rubber or oil palm plantation roads and develop hamlet tourism by utilizing the natural potential in the hamlet.

Keywords: Political accountability. GDM, Hamlet Government